

**Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap  
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)**

**HERMIN ARIFIANTI\***

**PAYAMTA**

**SUTARYO**

*Universitas Sebelas Maret*

**Abstract:** *This study discusses about the accountability of local governments in Indonesia. This study aims to examine the effect of financial investigation from Supreme Audit Institution in Indonesia - BPK RI (audit findings of internal control weakness, audit findings of noncompliance with regulations, and follow up recommendations), oversight from parliament, and supervision public with the local government's performance in Indonesia. This study uses multiple regression method to 197 districts/municipalities as a sample selected by purposive sampling method.*

*This study provides evidence that the result of investigation by BPK about audit findings of internal control weakness and audit findings of noncompliance with regulations have significant negative effect on local government's performance, and follow up recommendations have significant positive effect on local government's performance. While for oversight by legislature does not significant effect on the performance of local government and public supervision have significant positive effect. In other words, the implementation of external monitoring is more influential than internal monitoring in local government Indonesia.*

**Keywords:** *Monitoring Mechanism, the Local Government's Performance, Audit Findings, Follow Up Recommendations, Oversight by Legislature, Public Supervision.*

---

\* Corresponding author: hademeanz3@gmail.com

## A. PENDAHULUAN

Transformasi sistem pemerintahan dari sentralistik ke dalam desentralistik mengubah hubungan antara rakyat Indonesia dan negara. Otonomi daerah memberikan porsi kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola keuangan daerahnya (Bennet, 2010). Hubungan hak dan kewajiban daerah yang berupa hubungan antara penggunaan sumber daya (input) dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara efisien dan efektif (Purnomo, 2008). Sebagai daerah otonom, daerah diberi hak, wewenang, sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Pada proses pendelegasian wewenang terdapat hubungan antara masyarakat/*principal* dengan pemerintah daerah/*agent*, legislatif/*principal* dengan pemerintah daerah/*agent*, dan juga antara masyarakat/*principal* dengan legislatif/*agent*. Adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing peran, mengakibatkan adanya konflik yang disebut sebagai *agency conflict*.

Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk menciptakan *good governance*, yaitu dengan pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya melalui suatu proses yang dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel, transparan, dan memenuhi tujuan pelayanan publik (efektif) (Widyananda, 2008). *Good governance* diperlukan untuk dapat meminimalkan adanya *agency conflict*. Dalam rangka mewujudkan *good governance*, reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah dilakukan dalam rangka untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah (Rahmanurrasjid, 2008). Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia karena perbaikan akuntabilitas kinerja dapat berdampak pada upaya terciptanya *good governance* (Pambelum dan Urip, 2008). Akuntabilitas oleh pemerintahan di Indonesia mulai diberikan perhatian khusus. Hal ini berarti bahwa pemerintahan di Indonesia tidak lagi memperhatikan masalah-masalah input

dan output saja, tetapi telah memasuki tahapan yang berorientasi pada proses dan kinerja. Dengan kata lain, proses dan kinerja telah menjadi sebuah tuntutan masyarakat (Ishak, 2009).

Menurut Mardiasmo (2002) terdapat tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda, baik konsepsi maupun aplikasinya. Pengawasan mengacu pada tingkatan atau kegiatan yang dilakukan di luar pihak eksekutif yaitu masyarakat dan DPRD, untuk mengawasi kinerja pemerintahan daerah. Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif (Pemerintah Daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen dengan baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang diamanatkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2004, menjelaskan bahwa BPK adalah satu-satunya lembaga negara yang bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam UU Nomor 15 Tahun 2006, menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan keuangan negara yang dilakukan pemerintah daerah. Auditor (BPK) sebagai pihak ketiga yang independen diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja apakah telah bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* melalui laporan keuangan.

Mengacu pada UU No 32 Tahun 2004, partisipan pada organisasi pemerintahan meliputi rakyat, lembaga bupati atau walikota, dan DPRD. DPRD sebagai lembaga legislatif yang berperan sebagai mitra kerja eksekutif daerah mempunyai tiga fungsi secara khusus yaitu fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran), dan fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Dalam fungsi pengawasan, DPRD dapat dianggap setara dengan *board* dalam

*governance* berdasarkan konsep keagenan. Selain itu, juga terdapat pengawasan masyarakat (Waskat) sebagai *social control*. Masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai perorangan, kelompok maupun organisasi.

Kemampuan daerah dalam mencapai tujuan dan mengelola urusan daerah akan memperlihatkan performa (kinerja) daerah. Dalam menjalankan urusan tersebut, pemerintah daerah tidak menjadi satu-satunya pelaku. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tersebut tidak hanya ditentukan oleh pemerintah daerah saja, melainkan perlu ada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan paradigma *good governance* yang mengedepankan keterpaduan antara pemerintah (*state*), swasta (*private*), dan masyarakat (*society*) sebagai suatu sistem (LAN, 2007). Oleh karena itu, kinerja daerah tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sebagai suatu sistem penyelenggaraan otonomi daerah.

Penelitian ini mengulas mengenai akuntabilitas pemerintah daerah terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipandang dari hasil pemeriksaan oleh BPK, seperti kelemahan sistem pengendalian intern; ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan tindak lanjut rekomendasi atas temuan audit, serta dari DPRD dan masyarakat yang digunakan sebagai pengawasan untuk mengetahui apakah otonomi daerah telah membuahkan capaian sesuai dengan yang diharapkan atau justru kontraproduktif dengan apa yang telah direncanakan.

## **B. TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **1. Agency Theory**

Mengacu pada teori keagenan dari Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa hubungan keagenan sebagai kontrak, yang muncul ketika satu orang atau lebih

sebagai pemilik (*principal*) untuk mempekerjakan orang lain (*agent*) agar dapat memberikan suatu jasa kepada *principal* dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Dalam lingkup pemerintahan daerah di Indonesia, terdapat beberapa hubungan keagenan, yaitu antara masyarakat dan pemerintah daerah, masyarakat dan DPRD, dan DPRD dan pemerintah daerah (Nuraeni, 2012). Hubungan tersebut seperti hubungan antara *principal* dan *agent*. *Principal* memberikan wewenang pengaturan kepada *agent*, dan memberikan sumber daya kepada *agent* (dalam bentuk pajak dan lain-lain) (Pabelum dan Urip, 2008). Hubungan rakyat dengan pemerintah daerah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (*principal*) yang menggunakan pemerintah daerah (*agent*) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat.

## 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tugas dan wewenang kepala daerah yaitu memberikan laporan sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah. Bentuk laporan pertanggungjawaban yang lebih rinci dijelaskan dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat. Muatan informasi LPPD merupakan ringkasan LPPD. Kinerja merupakan hasil/keluaran dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (PP Nomor 8 Tahun 2006). Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD) adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak (Permendagri Nomor 73 Tahun 2009).

Pemerintah berkewajiban mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau disebut sebagai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. Tujuan utama dilaksanakannya evaluasi adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*. EPPD meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD), dan evaluasi daerah otonom baru (EDOB).

### **3. Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

BPK sesuai dengan fungsinya yaitu memeriksa, menguji, dan menilai dalam penggunaan keuangan daerah. Hasil pemeriksaan BPK dilaporkan kepada DPR untuk pengelolaan keuangan negara, dan kepada DPRD untuk pengelolaan keuangan daerah. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK menghasilkan temuan terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta tindak lanjut rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang.

#### **a. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern**

Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP adalah SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP terdiri dari lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.

Pelaksanaan sistem pengendalian intern seharusnya bertumpu pada penguatan sistem pengendalian yang sudah terbangun dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dalam organisasi mulai dari adanya kebijakan, pembentukan organisasi, penyiapan anggaran, sarana dan prasarana, penetapan personil yang melaksanakan, penetapan prosedur dan reviu pada seluruh tahapan. Sistem pengendalian intern yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja (Sarita, 2012). Partisipasi pimpinan dalam penyusunan anggaran, dan adanya kejelasan sasaran anggaran yang akan dilaksanakan, diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja dengan adanya sistem pengendalian dan pengawasan intern yang efektif. Pelaksanaan evaluasi anggaran dan umpan balik yang diperoleh diharapkan menjadi bahan penilaian terhadap keefektifan sistem pengendalian intern, sehingga semakin efektif sistem pengendalian intern, maka semakin meningkat pula kinerjanya (Ramandei, 2009).

Penelitian Shodiq (2001) serta Boritz dan Jee (2007) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu tidak adanya dukungan terhadap pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja keuangan. Perusahaan yang menghadapi ketidakpastian lingkungan yang tinggi dan menghadapi berbagai faktor kontijensi, yang cenderung melakukan perubahan secara perlahan menyesuaikan terhadap faktor-faktor kontijensi tersebut, sehingga membutuhkan biaya yang tinggi terlebih jika harus dilakukan penataan ulang

terhadap subsistem organisasional. Apabila penataan ulang tersebut sampai berlarut-larut, maka tujuan pencapaian kinerja yang tinggi tidak akan tercapai dengan baik. Penelitian juga menyatakan bahwa perusahaan yang melaporkan kelemahan pengendalian intern akan memiliki kinerja keuangan yang lebih lemah karena pengeluaran banyak dibutuhkan untuk memperbaiki kelemahan pengendalian intern dan gangguan operasional. Kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggungjawab kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan tugas. Kasus kelemahan SPI yang lain meliputi pejabat yang bertanggungjawab lemah dalam melakukan pengawasan maupun pengendalian kegiatan yang belum sepenuhnya memahami ketentuan dan belum adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Dengan adanya temuan kelemahan sistem pengendalian intern, maka pemerintah daerah seharusnya akan lebih berhati-hati dalam pelaksanaan sistem tersebut, agar dapat menciptakan sistem terintegrasi yang efisien dan mudah mencapai tujuan. Berdasarkan ulasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah.

***H<sub>1a</sub>: Kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan datang.***

#### **b. Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan**

Menurut pandangan Choi (2011) akuntansi memiliki kaitan dengan hukum. Terdapat beberapa elemen lingkungan yang dapat mempengaruhi akuntansi yaitu sistem akuntansi, sumber pendanaan, perpajakan, hubungan politik dan ekonomi, inflasi, tingkat perkembangan ekonomi, tingkat pendidikan, budaya, hukum dan perkembangan akuntansi. Temuan kerugian negara/daerah sebagai akibat perbuatan



melawan hukum baik sengaja maupun lalai karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat berupa pemborosan dan kebocoran dana hingga korupsi. Hal tersebut menjelaskan bahwa kinerja pemerintahan daerah rendah, disebabkan karena tidak adanya upaya optimalisasi pengelolaan dana publik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis, efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan kepada daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Tobirin (2008) menjelaskan bahwa selama ini penilaian kinerja aparat birokrasi tidak berbasis kinerja, tetapi hanya berbasis pada kepatuhan semata. Meskipun beberapa praktik kepatuhan dapat membatasi kinerja organisasi, tetapi praktik kepatuhan yang baik akan selalu mendukung fungsi efisien dan efektif dari suatu organisasi. Kepatuhan yang baik yang merupakan bagian dari manajemen yang baik, sehingga akan menghasilkan kinerja yang baik pula (Vago, 2008). Penelitian Zirman dan Rozi (2010) juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara kepatuhan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Semakin banyak temuan pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dari pemerintah daerah tersebut, yang merupakan salah satu komponen yang dinilai dalam EKPPD rendah, sehingga pengelolaan keuangan tersebut kurang baik yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja dari pemerintah daerah tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan pemeriksaan, maka seharusnya menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu pemerintah daerah (Mustikarini dan Debby, 2012). Berdasarkan ulasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah.

**H<sub>1b</sub>: Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan datang.**

**c. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Sesuai Rekomendasi**

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa yang relevan berdasarkan temuan pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Setiap temuan pemeriksaan dapat memiliki satu atau lebih rekomendasi. Rekomendasi dapat meminimalisasi akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk ditindaklanjuti terutama berkaitan untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah yang diaudit. Selain itu, tindak lanjut dilakukan agar temuan-temuan hasil pemeriksaan tidak terjadi secara berulang-ulang (Widiatmoko, 2012).

Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK wajib dilakukan oleh pejabat yang diperiksa. Pejabat yang diperiksa wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya enam puluh hari setelah LHP diterima. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pejabat wajib memberikan alasan yang sah, dan kemudian apabila tanpa adanya alasan yang sah, maka BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.

Tindak lanjut atas temuan audit berdasarkan rekomendasi merupakan suatu upaya *continuous improvement* atas kinerja entitas yang diperiksa. Bagi lembaga

pemeriksaan, tindak lanjut merupakan suatu evaluasi tentang kualitas hasil pemeriksaan. Manfaat dari suatu pemeriksaan hanya dapat dirasakan, apabila hasil temuan dan rekomendasi ditindaklanjuti. Tanpa tindak lanjut dari parlemen, eksekutif, instansi yang diperiksa dan aparat yang diberi wewenang melakukan investigasi, pemeriksaan menjadi tidak efektif dan akuntabilitas hanya akan menjadi mimpi belaka (Dwiputrianti, 2008).

Keefektifan suatu pemeriksanan dan penilaian tersebut tidak hanya tergantung oleh perencanaan yang baik tetapi juga ditentukan oleh adanya tindak lanjut terhadap rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan yang diajukan oleh auditor internal (Sali, 2010). Dalam hal ini dibutuhkan adanya hubungan yang baik antara auditor dengan pihak manajemen. Auditor dituntut untuk dapat memberikan suatu rekomendasi yang realistis serta tepat guna terhadap pihak manajemen serta pihak manajemen juga harus dapat merealisasikan rekomendasi yang diberikan auditor dengan tepat, sesuai dengan yang menjadi rekomendasi sebelumnya. Dalam penelitian Dwiputrianti (2011), tindak lanjut dari hasil temuan dan rekomendasi dari pemeriksaan masih relatif rendah. Beberapa instansi mengatakan bahwa tindak lanjut dari kasus korupsi atau pelanggaran tidak bisa dalam waktu singkat ditindaklanjuti dan membutuhkan waktu untuk diproses lebih dalam lagi.

Dalam mengupayakan penyelesaian tindak lanjut temuan audit agar dapat segera ditindak lanjuti diperlukan langkah-langkah yang dapat memacu manajemen untuk segera dapat menyelesaikan tindak lanjut temuan audit tersebut. Dengan memasukan faktor penyelesaian tindak lanjut sebagai salah satu faktor non finansial ke dalam penilaian kinerja manajemen, diharapkan dapat menjawab kendala terhadap tidak terselesaikannya tindak lanjut temuan audit, sehingga dapat meningkatkan nilai

kinerja secara keseluruhan (Hartono, 2006). Berdasarkan ulasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah.

***H<sub>1c</sub>: Tindak lanjut atas temuan pemeriksaan sesuai rekomendasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan datang.***

#### **4. Fungsi Pengawasan DPRD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi DPRD untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien atau bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik.

Fungsi pengawasan ini mengandung makna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (*early warning system*), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan aktivitas sebagai kontribusi untuk memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan perbaikan dalam proses pembangunan agar aktivitas pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien (Kartiwa, 2006).

Anggota DPRD yang sekaligus menjadi anggota partai politik tertentu semestinya dapat menjadi bagian dari sistem yang mengkritisi kinerja eksekutif. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan pertanggungjawaban akhir Tahun Anggaran kepala daerah kepada DPRD yang berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap hasil kerja selama satu tahun anggaran dan sebagai laporan kemajuan pelaksanaan tugas (progress

report), maka laporan tersebut merupakan alat untuk penilaian dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk tahun-tahun berikutnya. DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, diharapkan benar-benar dapat memastikan bahwa pemerintah daerah berpihak pada kepentingan publik, dan harus mampu mewujudkan tujuan dan kepentingan bersama yang sudah disepakati dalam proses legislasi dan penganggaran (Muhi, 2011). Berdasarkan ulasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah.

**H<sub>2</sub>: Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan datang.**

## **5. Pengawasan Masyarakat dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dikenal dengan pengawasan masyarakat. Pengawasan masyarakat diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masyarakat mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai perorangan, kelompok maupun organisasi dengan cara pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpang atau penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pemerintah daerah maupun DPRD atau berupa penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan baik preventif maupun represif atas masalah. Informasi dan pendapat tersebut disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan atau instansi yang terkait (Cahyat, 2004).

Pengawasan masyarakat berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat. Salah satu indikator kualitas pendidikan masyarakat adalah indeks pembangunan manusia

(IPM). Ketika suatu wilayah memiliki sumber daya manusia berkualitas maka wilayah ini akan jauh lebih berkembang dibanding wilayah lainnya (Amaliah, 2004). Penelitian Manasan, Gonzalez, dan Gaffud (1999), Ranis, Stewart dan Ramirez (2000) menyatakan bahwa daerah yang memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi cenderung menghasilkan kinerja yang tinggi pula. Berdasarkan ulasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah.

**H<sub>3</sub>: *Pengawasan masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan datang.***

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Indonesia Tahun 2011. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Kriteria dan hasil pengambilan sampel penelitian tersaji dalam Tabel 1 berikut ini.

#### INSERT TABEL 1

### 2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Sumber data terdiri dari hasil Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2011 yang dipublikasi dalam SK Mendagri Nomor 120-2818 Tahun 2013, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2010 yang dipublikasi melalui *website* Badan Pemeriksa Keuangan, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010 diperoleh dari Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Badan Pemeriksa Keuangan, komposisi anggota DPRD yang mendukung pemilihan kepala daerah dipublikasikan melalui *website* Pemerintah

Kabupaten/Kota, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2010 yang dipublikasi melalui *website* Badan Pusat Statistik.

### 3. Variabel dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan variabel independen yang terdiri dari; hasil pemeriksaan keuangan daerah oleh BPK yang terdiri dari kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan; dan tindak lanjut temuan pemeriksaan yang sesuai dengan rekomendasi, serta fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, dan pengawasan masyarakat. Selain itu juga menggunakan variabel kontrol berupa ukuran daerah dan tipe daerah. Variabel dan pengukurannya secara lengkap dapat disajikan dalam Tabel 2 berikut ini.

#### INSERT TABEL 2

Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan oleh Kemendagri. Penelitian yang dilakukan Lee (2008) membahas indikator dan informasi kinerja yang menggunakan laporan tahunan sebagai sarana pengawasan untuk manajemen intern dan akuntabilitas ekstern. Penelitian ini menggunakan definisi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ini berasal dari Laporan Hasil Pemeringkatan Kinerja Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan LPPD Tahun 2011. Variabel independen dalam penelitian ini seperti yang digunakan pada penelitian Manasan, Gonzalez, dan Gaffud (1999), Vafeas (2000), Hartono (2006), Johnson et al. (2008), dan Mustikarini dan

Debby (2012) yaitu hasil pemeriksaan oleh BPK yang berupa temuan atas kelemahan sistem pengendalian intern, temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan yang sesuai dengan rekomendasi. Selain itu juga menggunakan komposisi dewan di daerah yang mendukung dalam proses pemilihan kepala daerah tahun 2010 dan indeks pembangunan manusia tahun 2010, sebagai sarana pengawasan dari DPRD dan masyarakat.

#### 4. Model Penelitian

Metode pengujian yang dilakukan menggunakan uji regresi berganda dengan formula sebagai berikut.

$$KPPD_{it} = \alpha - \beta_1 KSPIPD_{it-1} - \beta_2 KPDKPU_{it-1} + \beta_3 TLTPSR_{it-1} + \beta_4 FPDPRD_{it-1} + \beta_5 WASKAT_{it-1} + \beta_6 SIZELG_{it-1} + \beta_7 TYPELG_{it-1} + \varepsilon_i$$

keterangan:

$KPPD_{it}$	: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah $i$ tahun $t$
$KSPIPD_{it-1}$	: Kelemahan SPI pada pemerintah daerah $i$ pada tahun $t-1$
$KPDKPU_{it-1}$	: Ketidakpatuhan Peraturan pada pemerintah daerah $i$ tahun $t-1$
$TLTPSR_{it-1}$	: Tindak Lanjut Rekomendasi pemerintah daerah $i$ tahun $t-1$
$FPDPRD_{it-1}$	: Komposisi DPRD pada daerah $i$ pada tahun $t-1$
$WASKAT_{it-1}$	: Pengawasan masyarakat pada pemerintah daerah $i$ tahun $t-1$
$SIZELG_{it-1}$	: Ukuran aset pemerintah daerah $i$ tahun $t-1$
$TYPELG_{it-1}$	: Tipe pemerintahan daerah (kabupaten/kota) pada tahun $t-1$
$\alpha$	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_7$	: Koefisien regresi
$\varepsilon_i$	: <i>Standard error</i>



## D. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### 1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran umum mengenai data yang digunakan dalam penelitian. Deskripsi yang dimaksud meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Selengkapnya deskripsi data dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 3 di bawah ini.

INSERT TABEL 3

### 2. Asumsi Klasik

Asumsi klasik terdiri dari uji normalitas data, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinieritas telah terpenuhi dan tersaji dalam Tabel 4.

INSERT TABEL 4

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji statistik non parametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S) Test* seperti pada Tabel 4, yang menunjukkan nilai *Kolmogorov-Smirnov (K-S) Z* untuk sampel penelitian 197 sebesar 1,379 dan probabilitasnya sebesar 0,045 yang nilainya lebih kecil dari nilai signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal. Karena hasil penelitian menunjukkan tidak normal, maka dilakukan identifikasi dan membuang data *outlier*. Akhirnya diperoleh sampel akhir sebanyak 187 dan data terdistribusi dengan normal karena nilai signifikansinya menjadi 0,609 yang berarti lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 dengan nilai *Kolmogorov-Smirnov (K-S) Z* sebesar 0,761.

Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM Test) karena dalam penelitian ini menggunakan sampel besar yaitu diatas 100. Dalam Tabel 4

uji autokorelasi menunjukkan koefisien parameter untuk residual memberikan probabilitas sebesar 0,683 yang berarti lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya masalah autokorelasi.

Hasil uji Park untuk menguji adanya heteroskedastisitas dalam Tabel 4 menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini tidak ada yang signifikan secara statistik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Hasil uji VIF dan Tolerance dalam Tabel 4 menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai tolerance di atas 10% dan nilai VIF di bawah 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini terbebas dari multikolonieritas atau tidak ada korelasi antar variabel bebas.

### 3. Pengujian Hipotesis

Hasil analisis data dengan menggunakan model regresi berganda dalam penelitian ini dapat disajikan dalam Tabel 5 berikut ini.

#### INSERT TABEL 5

Nilai *adjusted*  $R^2$  digunakan untuk melihat seberapa besar variasi dari nilai variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi nilai dari variabel-variabel independennya. Nilai *adjusted*  $R^2$  pada Tabel 5 sebesar 0,250; berarti hanya 25% variasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dijelaskan oleh pengawasan pihak ekstern yang berupa hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan masyarakat, serta pengawasan intern yang dilakukan oleh DPRD, sedangkan 75% variasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dijelaskan oleh variabel-variabel diluar variabel independen dalam penelitian ini. Nilai F value pada Tabel 5 sebesar 9,873 dengan

signifikansi 0,000, artinya bahwa model regresi tersebut layak (*fit*) untuk digunakan dalam pengujian dan secara bersama-sama variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen.

Variabel kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah (KSPIP) dengan nilai probabilitas 0,021 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan 5%, sehingga hipotesis pertama diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis sebelumnya, yaitu kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Shodiq (2001), Imas (2009), Mawanda (2011), Muraleetharan (2011), Lego (2012), Suyono dan Hariyanto (2012), serta Sarita (2012) yang menyatakan bahwa dengan adanya sistem pengendalian intern yang efektif, maka kinerja yang dihasilkan akan semakin tinggi. Pada penelitian Aikins (2011) dan Johnson et al.(2012) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan audit dan efektivitas pengendalian intern dengan kinerja keuangan. Dengan laporan audit yang mempertimbangkan keakuratan dan keandalan informasi keuangan, sehingga dapat memungkinkan untuk memperbaiki kekurangan atas pengendalian intern. Auditor membantu entitas untuk bertanggungjawab kepada masyarakat melalui peningkatan pengendalian intern yang efisien dan kinerja keuangan. Pelaksanaan sistem pengendalian intern bertumpu pada penguatan sistem pengendalian yang sudah terbangun dan dilaksanakan oleh seluruh aktor dalam organisasi mulai dari adanya kebijakan, pembentukan organisasi, penyiapan anggaran, sarana dan prasarana, penetapan personil yang melaksanakan, penetapan prosedur dan reviu pada seluruh tahapan pembangunan. Sistem pengendalian intern yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja (Sarita, 2012). Partisipasi pimpinan dalam penyusunan anggaran, dan adanya kejelasan sasaran anggaran yang akan dilaksanakan, diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja dengan adanya sistem pengendalian dan pengawasan intern yang efektif.

Pelaksanaan evaluasi anggaran dan umpan balik yang diperoleh diharapkan menjadi bahan penilaian terhadap efektivitas sistem pengendalian intern, sehingga semakin efektif sistem pengendalian intern maka semakin meningkat pula kinerjanya (Ramandei, 2009).

Variabel ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan perundang-undangan (KPKDKPU) dengan nilai probabilitas 0,051 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan 10%, sehingga hipotesis kedua diterima. Penelitian ini sesuai dengan hipotesis sebelumnya, yaitu ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan perundang-undangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semakin banyak temuan audit, maka pengelolaan keuangan pemerintah daerah tersebut juga kurang baik, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap buruknya kinerja dari pemerintah daerah tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan pemeriksaan, maka menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu pemerintah daerah (Mustikarini dan debby, 2008). Dalam penelitian Zirman dan Rozi (2010) juga menyatakan bahwa ketidakpatuhan pada peraturan perundangan juga memiliki pengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja. Penelitian serupa juga dihasilkan dalam penelitian Riantiarno (2011). Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah ditentukan langsung oleh ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Meskipun beberapa praktik kepatuhan dapat membatasi kinerja organisasi, tetapi praktik kepatuhan yang baik akan selalu mendukung fungsi efisien dan efektif dari suatu organisasi, sehingga dengan kepatuhan yang baik yang merupakan bagian dari manajemen yang baik, sehingga akan menghasilkan kinerja yang baik pula (Vago, 2008).

Variabel tindak lanjut atas temuan pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi (TLTPSR) dengan nilai probabilitas 0,003 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan 1%, sehingga hipotesis ketiga diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis

sebelumnya, yaitu tindak lanjut rekomendasi atas temuan audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada penelitian Lucky dalam Sali (2010) menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara tindak lanjut rekomendasi manajemen audit terhadap kinerja. Penelitian Hartono (2006), menunjukkan adanya peningkatan dalam penyelesaian tindak lanjut temuan audit dari tahun ke tahun. Proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan mendefinisikan proses manajemen kinerja yang mampu memperbaiki dan mengembangkan kinerja maupun kompetensi aparat pemerintah, baik sebagai individu maupun sebagai tim untuk meningkatkan efektivitas institusi secara keseluruhan.

Variabel fungsi pengawasan DPRD (FPDPRD) dengan nilai probabilitas 0,122 yang lebih besar dari tingkat kesalahan 10%, sehingga hipotesis keempat ditolak. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau kurang efektif. Pengawasan yang dilakukan belum memberikan umpan balik yang substansial untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau melakukan koreksi perbaikan. Akibat DPRD yang belum bekerja secara profesional dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga penyerapan anggaran yang dilakukan oleh pihak eksekutif berjalan tanpa pengawasan yang berarti dan hasil pengawasan kurang memberikan manfaat bagi pengelolaan pemerintahan daerah. Dengan kata lain bahwa anggota DPRD terpilih belum optimal melakukan kinerja pengawasan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Nafchuka (2003), Kahar (2005), Mahuse (2010), dan Santoso (2012). Penyebab belum optimalnya fungsi pengawasan oleh DPRD yaitu karena sistem partai yang terpusat membuat anggota DPRD menjadi lebih memperjuangkan kepentingan partai/golongan/kelompoknya sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat. Hal ini sangat masuk akal mengingat mereka adalah anggota/kader partai yang berkewajiban memperjuangkan

kepentingan partainya. Karena itu, dalam pengambilan keputusan mereka tidak dapat melepaskan diri dari kepentingan kelompok.

Variabel pengawasan masyarakat (WASKAT) dengan nilai probabilitas 0,006 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan 1%, sehingga hipotesis kelima diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian Manasan, Gonzalez, dan Gaffud (1999), Ranis, Stewart, dan Ramirez (2000), serta Amaliah (2004) yang menyatakan bahwa variabel pembangunan manusia sangat mempengaruhi kinerja. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan pengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Artinya, ketika kualitas pembangunan manusia baik maka kinerja juga akan meningkat. Sumber daya manusia (SDM) merupakan motor penggerak tumbuhnya perekonomian suatu wilayah. Ketika suatu wilayah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka wilayah ini akan jauh lebih berkembang dibanding daerah lainnya. Ini terjadi karena penduduk di daerah tersebut akan lebih mudah dalam mengadopsi berbagai informasi maupun teknologi yang ada. Penduduk di daerah tersebut akan menjadi lebih produktif dalam mengelola sumber-sumber potensial yang dapat mendorong pertumbuhan daerahnya. Pengawasan masyarakat diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme. Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui pengaduan atas dugaan terjadinya penyimpang atau penyalahgunaan kewenangan. Partisipasi masyarakat sangat penting karena pada dasarnya bentuk kebijakan otonomi dan desentralisasi harus tetap mengedepankan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Jika partisipasi rakyat di daerah tinggi maka proses terciptanya otonomi dan desentralisasi akan terlaksana dengan lancar dan baik. Dengan demikian, adanya partisipasi masyarakat akan meningkatkan pengawasan jalannya pemerintahan daerah.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji hubungan pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pengawasan ekstern yang dilakukan oleh masyarakat dan hasil pemeriksaan oleh BPK terkait kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan yang sesuai dengan rekomendasi digunakan dengan baik oleh pemerintah daerah sebagai sarana perbaikan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan datang. Sementara itu, fungsi pengawasan intern yang dilakukan oleh DPRD tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan datang. Hal ini mengindikasikan bahwa anggota dewan masih lebih mementingkan partainya daripada kinerja daerahnya.

### 2. Keterbatasan

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai keterbatasan seperti berikut.

- a. Penelitian ini menggunakan sumber data dari *website* pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengumpulan data karakteristik DPRD yang beberapa non aktif, tidak dapat diakses atau tidak mempublikasikan data DPRD.
- b. Pengawasan masyarakat dalam penelitian ini hanya menggunakan indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia), yang tidak secara langsung menunjukkan aktivitas pengawasan masyarakat pada pemerintah daerah.
- c. Pengawasan DPRD dalam penelitian ini hanya menggunakan komposisi dewan sebagai karakteristik DPRD.

### 3. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dilakukan di atas, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal berikut ini.

- a. Menggunakan sumber data lain seperti dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pengumpulan data karakteristik DPRD, sehingga diperoleh jumlah sampel yang lebih besar.
- b. Menambahkan indikator partisipasi masyarakat dalam proses politik atau dalam pemilihan umum, pengaduan masyarakat, atau aktivitas demonstrasi, sehingga dapat memperkuat aktivitas pengawasan masyarakat pada pemerintah daerah.
- c. Menambahkan indikator dalam pengawasan DPRD seperti pengalaman kerja dewan, latar belakang pendidikan dewan, ukuran dewan, struktur kepemimpinan dewan maupun agenda pengawasan dewan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aikins, S. K. 2011. An Examination of Government Internal Audits' Role in Improving Financial Performance. *Public Finance and Management* 11 (4): 306-337.
- Amaliah, I. 2004. Pengaruh Pembangunan Manusia terhadap Kinerja Ekonomi Dati II di Jawa Barat, 1999-2003. *Jurnal Mimbar Dikti* 22 (2): 213-233.
- Bennet, R. 2010. Decentralizing Authority After Suharto: Indonesia's Big Bang, 1998-2010. *Innovations for Successful Societies*. Princeton University: 1-11.
- Boritz, E., dan Jee H. L. 2007. *Control Weaknesses, IT Governance and Firm Performance*. Paper. University of Waterloo.
- BPK. 2011. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2010*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- BPK. 2011. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2010*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- BPK. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010*. Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- BPK. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010*. Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Cahyat, A. 2004. *Sistem Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pembahasan Peraturan Perundangan di Bidang Pengawasan*. Paper. Center for International Forestry Research.
- Choi, F. D. S., dan Gary K. M. 2011. *International Accounting*. Seventh Edition. Prentice Hall.
- Dwiputrianti, S. 2008. Efektivitas Laporan Hasil Temuan Pemeriksaan dalam Mewujudkan Reformasi Transparansi Fiskal dan Akuntabilitas Sektor Publik (2001-2008) di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi* 5 (4): 338-355.



- , 2011. *Effectiveness of Public Sector Audit Reports in Indonesia (Preceding and Following Audit Reform)*. Dissertation. The Australian National University.
- Hartono, T. 2006. *Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit sebagai Unsur Penilaian Kinerja Manajemen Kantor Cabang (Studi Kasus pada Bank BTN)*. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Imas, P. 2009. Hubungan Struktur Sistem Pengendalian Manajemen dan Proses Sistem Pengendalian Manajemen dengan Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO). *Fokus Ekonomi* 4 (1): 27-43.
- Ishak, M. 2009. Kebijakan Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah. *Inovasi Media Litbang Provinsi Sumatera Utara* 6 (3): 143-151.
- Jensen, M dan W. Meckling. 1976. Theory of the Firm; Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*: 1-77.
- Johnson, L. E., Lowensohn S., Reck J. S. dan P. Davies. 2012. Management Letter Comments: Their Determinants and Their Association with financial Reporting Quality in Local Government. *Journal Accounting Public Policy* 31: 575-592.
- Kahar, Y. 2005. *Fungsi DPRD dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Padang Panjang*. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Kartiwa, H. A., 2006. *Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan "good governance"*. Paper. Universitas Padjajaran.
- Keputusan Mendagri Nomor 120-2818 Tahun 2013 tentang *Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2011*.
- LAN. 2007. *Kajian Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Daerah*. Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah-LAN Jakarta.
- Lee, J. 2008. Preparing Performance Information in The Public Sector: an Australian Perspective. *Journal Financial Accountability and Management* 24 (2): 117-149.
- Lego, W. 2012. Internal Control System Implementation to Officer Performance with Dysfunctional Behavior as Moderating Variable. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 10 (1): 30-39.
- Mahuse, L., T. T. A. Lolo, dan S. Suhab. 2010. *The Implementation of the Monitoring Function of People's Representative Council in the Development of Merauke Regency*. Paper. Universitas Hasanuddin.
- Manasan, R. G., E. T. Gonzalez, dan R. B. Gaffud. 1999. Indicators of Good Governance: Developing an Index of Governance Quality at LGU Level. *Journal of Phillippine Development* 48 (26): 149-212.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. *Jurnal Otonomi Daerah* 1 (4): 1-14.
- Mawanda, S. P. 2011. *Effects of Internal Control Systems on Financial Performance in an Institution of Higher Learning in Uganda A Case of Uganda Marytrs University*. Dissertation. Uganda Martyrs University.
- Muhi, A. H. 2011. *Optimalisasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Paper. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- Muraleetharan, P. 2011. *Internal Control and Impact of Financial Performance of The Organizations (Special Reference Public and Private Organizations in Jaffna District)*. Paper. University of Jaffna.
- Mustikarini, W. A., dan Debby F. 2012. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007*. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
- Nafchuka, A. G. 2003. *Pembangunan Komunikasi Politik Antara Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Perspektif Ketahanan Nasional (Studi Kasus di Kabupaten Sidoarjo)*. Tesis. Universitas Indonesia.
- Nuraeni. 2012. *The Impact of Local Governments Characteristics Toward Their Audit Quality for Financial Reports of 2008-2009*. 3rd International Conference on Business and Economic Research (3rd ICBER 2012) Proceeding. Indonesia.
- Pambelum, Y. J., dan Urip S. 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis* 4 (1): 14-33.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.



- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Pernendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang *Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Purnomo, K. 2008. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jalan Baru Menuju Terwujudnya Good Governance. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah* 2 (7): 105-116.
- Rahmanurrasjid, A. 2008. *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah (Studi di Kabupaten Kebumen)*. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Ranis, G., F. Steward, dan A. Ramirez. 2000. Economic Growth and Human Development. *World Development* 28 (2): 197-219.
- Ramandei, P. 2009. *Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura)*. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Riantiarno, R. dan N. Azlina. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). *Pekbis Jurnal* 3 (3): 560-568.
- Sali, A. K. 2010. *Tindakan Rekomendasi Auditor Internal Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan Melalui Pendekatan Balanced Scorecard Pada PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero*. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia.
- Santoso, M. A. 2011. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan. *Jurnal Hukum* 4 (15): 604-620.
- Sarita, P. D. 2012. Pengaruh Pengendalian Internal dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan SPBU Yogyakarta (Studi Kasus Pada SPBU Anak Cabang Perusahaan RB.Group). *Jurnal Nominal* 1 (1): 1-22.
- Shodiq, M. J. 2001. *Pengaruh Sistem Kontrol terhadap Kinerja Keuangan: Uji Fit Versus Uji Internal Consistency*. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Suyono, E. dan E. Hariyanto. 2012. Relationship between Internal Control, Internal Audit, and Organization Commitment with Good Governance: Indonesian Case. *China-USA Business Review* 11 (9): 1237-1245.
- Tobirin. 2008. Penerapan Etika Moralitas dan Budaya Malu Dalam Mewujudkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS* 2: 16-21.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang *Badan Pemeriksa Keuangan*.
- Vago. 2008. *Compliance-Does it Restrict Performance?* Australasian Police Audit Conference. Auditor General Victoria.
- Vafeas, N., 2000. Board Structure and the Informativeness of Earnings. *Journal of Accounting and Public Policy* 19 (2): 139-160.
- Widiatmoko, A. 2012. *Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK*. Warta BPK. Jakarta.
- Widyananda, H. 2008. *Revitalisasi Peran Internal Auditor Pemerintah untuk Penegakan Good Governance di Indonesia*. Publikasi, Seminar, Makalah dan Sambutan BPK RI Nomor: 3/PUB/VI/12/2008. Universitas Padjajaran.
- Zirman, E. D., dan R. M. Rozi. 2010. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ekonomi* 18 (1): 1-12.



LAMPIRAN

**Tabel 1**  
**Pemilihan Sampel**

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Pemerintah daerah di Indonesia per tahun 2011	530
2.	Pemerintah provinsi di Indonesia per tahun 2011	(33)
3.	Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia per tahun 2011	497
4.	Pemerintah kabupaten/kota yang tidak mempunyai skor indeks kinerja tahun 2011 yang dipublikasikan oleh Kemendagri	(42)
5.	Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki LKPD tahun 2010, tetapi datanya tidak lengkap	(2)
6.	Pemerintah kabupaten/kota yang tidak mempunyai indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2010 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik	(1)
7.	Pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai <i>website</i> , tetapi tidak dapat diakses, non aktif, tidak mempublikasikan atau tidak lengkap menginformasikan data DPRD	(255)
8.	Jumlah sampel penelitian	197

*Sumber: Data sekunder yang diolah*

**Tabel 2**  
**Variabel Penelitian**

No.	Variabel	Jenis Variabel	Akronim	Definisi Operasional
1.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	dependen	KPPD	Skor indeks yang dipublikasikan oleh Kemendagri
2.	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	independen	KSPIP	Jumlah kasus temuan kelemahan SPI dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah
3.	Ketidapatuhan Pemerintah Daerah terhadap Ketentuan Perundang-Undangan	independen	KPDKPU	Jumlah temuan ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan yang mengakibatkan kerugian daerah dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah
4.	Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan sesuai dengan Rekomendasi	independen	TLTPSR	Jumlah tindak lanjut yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah
5.	Fungsi Pengawasan DPRD	independen	FPDPRD	Jumlah komposisi anggota DPRD yang mendukung pemilihan kepala daerah yang dipublikasikan melalui website Pemerintah Kabupaten/Kota
6.	Pengawasan Masyarakat	independen	WASKAT	Indeks Pembangunan Manusia yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik
7.	Ukuran Daerah	kontrol	SIZELG	Ln total aset pemerintah daerah dalam laporan keuangan pemerintah daerah
8.	Tipe Daerah	kontrol	TYPELG	Variabel dummy yang diukur dengan angka 1 untuk kota dan 0 untuk kabupaten

**Tabel 3**  
**Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev.
KPPD	187	1,78	3,14	2,6091	0,2776
KSPIPD	187	0,00	1,00	0,66	0,476
KPDKPU	187	0,00	0,28	0,0127	0,0305
TLTPSR	187	0,00	1,00	0,5148	0,2790
FPDPRD	187	0,00	0,82	0,3948	0,1887
WASKAT	187	60,16	79,09	71,9756	3,3503
SIZELG	187	26,40	29,89	28,1249	0,5632
TYPELG	187	0,00	1,00	0,2139	0,4111
Valid N (listwise)	187				

Keterangan:

*KPPD = kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; KSPIPD = kelemahan SPI; KPDKPU = ketidakpatuhan terhadap peraturan; TLTPSR = tindak lanjut sesuai rekomendasi; FPDPRD = fungsi pengawasan DPRD; WASKAT = pengawasan masyarakat; SIZELG = ukuran daerah; TYPE LG = tipe daerah*

Sumber: Data sekunder yang diolah

**Tabel 4**  
**Hasil Pengujian Asumsi Klasik**

Uji	N	K-S Z	Tolerance	VIF	Sig.
Normalitas	197	1,379			0,045
Normalitas	187	0,761			0,609
Autokorelasi	187				0,683
Heteroskedastisitas	187				
- KSPIPD					0,818
- KPDKPU					0,750
- TLTPSR					0,965
- FPDPRD					0,155
- WASKAT					0,656
- SIZELG					0,149
- TYPELG					0,860
Multikolinieritas	187				
- KSPIPD			0,936	1,069	
- KPDKPU			0,895	1,118	
- TLTPSR			0,884	1,131	
- FPDPRD			0,960	1,042	
- WASKAT			0,578	1,730	
- SIZELG			0,831	1,203	
- TYPELG			0,636	1,572	

Keterangan:

*KSPIPD = kelemahan SPI; KPDKPU = ketidakpatuhan terhadap peraturan; TLTPSR = tindak lanjut sesuai rekomendasi; FPDPRD = fungsi pengawasan DPRD; WASKAT = pengawasan masyarakat; SIZELG = ukuran daerah; TYPE LG = tipe daerah; N = jumlah sampel; K-S Z = Kolmogorov-Smirnov Z; VIF = Variance Inflation Factor*

Sumber: Data sekunder yang diolah

**Tabel 5**  
**Hasil Pengujian Hipotesis**

	<b>Expt</b>	<b>B</b>	<b>t-value</b>	<b>Sig.</b>
Constant		-1,834	-1,961*	0,051
KSPIPD	-	-0,089	-2,331**	0,021
KPDKPU	-	-1,200	-1,969*	0,051
TLTPSR	+	0,204	3,035***	0,003
FPDPRD	+	0,148	1,555	0,122
WASKAT	+	0,019	2,795***	0,006
R <sup>2</sup>			0,279	
Adj. R <sup>2</sup>			0,250	
F-value			9,873	
Asymp sig.			0,000	

*Keterangan:*

*KSPIPD = kelemahan SPI; KPDKPU = ketidakpatuhan terhadap peraturan; TLTPSR = tindak lanjut sesuai rekomendasi; FPDPRD = fungsi pengawasan DPRD; WASKAT = pengawasan masyarakat;*

*\*\*\*signifikan pada level 1%*

*\*\*signifikan pada level 5%*

*\*signifikan pada level 10%*

*Sumber: Data sekunder yang diolah*